

Nurhuda Ardillah

(1) PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN E-PROCUREMENT TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH D...

 Akuntansi

 Fak. Ekonomi & Bisnis

 LLDIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3457121172

Submission Date

Jan 14, 2026, 8:31 AM GMT+7

Download Date

Jan 14, 2026, 8:37 AM GMT+7

File Name

RISET_E-BUDGETING_DAN_E-PROCUREMENT-14_-_Nurhuda_Ardillah.docx

File Size

60.3 KB

14 Pages

3,714 Words

26,042 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 5%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 9% Internet sources
- 5% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.universitassuryadarma.ac.id	1%
2	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
3	Publication	Viky Dahlia Anugraheni. "PRODUKTIVITAS BURUH LINTING ROKOK: PERAN USIA, ...	<1%
4	Internet	etd.umy.ac.id	<1%
5	Internet	journaledutech.com	<1%
6	Internet	jurnal.untan.ac.id	<1%
7	Internet	id.123dok.com	<1%
8	Internet	jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id	<1%
9	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
10	Internet	www.ipm2kpe.or.id	<1%
11	Publication	Edi Suarno Nurdin, Baso Amang, Annas Priyadi. "Pengaruh Kompensasi, Motivasi ...	<1%

12	Internet	text-id.123dok.com	<1%
13	Internet	123dok.com	<1%
14	Publication	Aldi Riyanto, Yulia Tri Kusumawati, Praja Hadi Saputra. "Pengaruh Kompensasi d...	<1%
15	Publication	Desti Siti Nur Hasanah, Nur Efendi, Hani Damayanti Aprilia. "FENOMENA TURNO...	<1%
16	Internet	media.neliti.com	<1%
17	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
18	Internet	repository.mercubuana.ac.id	<1%
19	Internet	repository.unimal.ac.id	<1%
20	Internet	www.coursehero.com	<1%
21	Internet	www.researchgate.net	<1%

PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH DALAM AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-budgeting and e-procurement implementation on regional spending efficiency in the context of public sector financial accounting. The study used a quantitative approach, with a population of all Regional Apparatus Organizations (OPD) in Palopo City, while the sample was determined using a purposive sampling technique of 30 OPDs. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression using SPSS. The results indicate that e-budgeting and e-procurement have a significant effect on regional spending efficiency. The implementation of both systems has been shown to increase transparency, data accuracy, and the effectiveness of the budgeting and procurement processes. The implications of this study indicate that digital transformation in the public financial system is a strategic step in realizing efficient, transparent, and accountable budget governance. Therefore, local governments need to improve the competence of their apparatus and strengthen their technological infrastructure to optimize the implementation of both systems to support regional spending efficiency.

Keywords: *E-budgeting, E-procurement, Regional Spending Efficiency, Public Sector Accounting*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* terhadap efisiensi belanja daerah dalam konteks akuntansi keuangan sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo, sementara sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling sebanyak 30 OPD. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-budgeting* dan *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Penerapan kedua sistem tersebut terbukti meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada sistem keuangan publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur serta memperkuat

infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan penerapan kedua sistem tersebut dalam rangka mendukung efisiensi belanja daerah.

Kata Kunci: *E-budgeting*, *E-procurement*, Efisiensi Belanja Daerah, Akuntansi Sektor Publik

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi pemerintahan, perubahan sistem keuangan publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah penggunaan sistem yang berbasis elektronik, seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*, yang berfungsi sebagai alat strategis dalam modernisasi birokrasi keuangan publik (A'yun & Hartaman, 2021).

E-budgeting memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan serta penganggaran secara digital, yang dapat meminimalkan risiko manipulasi data dan mempercepat proses birokrasi di sektor keuangan. Sementara itu, *e-procurement* memberikan kesempatan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara online, guna meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* (A. S. Apriliani *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Ayem, (2021) menunjukkan bahwa *e-budgeting* serta pengungkapan laporan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi keuangan sektor publik, meskipun kontrol internal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, hasil penelitian Frankoe *et al.*, (2021) juga menyatakan bahwa *e-procurement* memberikan dampak positif terhadap penggunaan anggaran daerah, meskipun belum secara langsung mengukur efisiensi belanja yang dihasilkan.

Meskipun telah diterapkan secara luas, efektivitas *e-budgeting* dan *e-procurement* dalam meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas keuangan daerah masih menghadapi beberapa kendala. Rendahnya penggunaan sistem digital di sejumlah daerah disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi infrastruktur yang belum memadai (Fikriyah & Trisnaningih, 2022). Peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak yang saling terhubung, menjadi syarat penting untuk keberhasilan penerapan sistem tersebut. Selain itu, standarisasi dan integrasi antar-aplikasi keuangan daerah juga diperlukan agar semua proses anggaran, pengadaan, dan pelaporan dapat berlangsung secara bersamaan dan transparan (Narimawati *et al.*, 2024).

Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja menekankan pentingnya penguatan sistem keuangan digital sebagai

alat untuk mengontrol anggaran. Sasaran efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306,69 triliun pada tahun 2025, yang juga mencakup efisiensi dalam transfer ke daerah, menunjukkan bahwa transformasi digital melalui *e-budgeting* dan *e-procurement* memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Tjeme, 2025). Keberhasilan dalam penerapan kedua sistem ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta komitmen dari aparat pemerintah daerah (Mubaraq *et al.*, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement* dalam memperkuat pengelolaan keuangan ditingkat daerah. A. Apriliani *et al.*, (2022) menemukan bahwa *e-budgeting* memiliki dampak positif terhadap transparansi dan tanggung jawab dalam pengeluaran daerah. Di sisi lain, Ariadi *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa *e-procurement* memiliki efektivitas dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan selama proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan Prayitno, Henro, Anggita, (2025) menekankan bahwa *e-budgeting* dan publikasi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara Handoko, (2022) menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran walaupun belum melakukan pengukuran langsung terhadap efisiensi belanja.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* terhadap efisiensi belanja daerah dalam konteks akuntansi keuangan sektor publik. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan bukti nyata mengenai seberapa efektif sistem digital dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, serta akuntabel, dan juga sebagai referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi pada sistem keuangan publik.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntansi keuangan sektor publik merupakan kegiatan untuk mengenali, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi serta keuangan badan pemerintahan yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran utamanya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang tepat dan dapat dipercaya bagi masyarakat, legislatif, dan lembaga pengawas dalam menilai kinerja serta tanggung jawab pemerintah (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Berbeda dari akuntansi sektor swasta yang fokus pada keuntungan, akuntansi sektor publik lebih mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pemanfaatan dana publik. Di dalam konteks pemerintahan daerah, akuntansi keuangan sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efisien serta memperkuat prinsip *good governance* di tingkat lokal.

Konsep Good Governance

Teori *good governance* menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Implementasi *e-budgeting* memperkuat prinsip transparansi karena seluruh tahap perencanaan dan penganggaran dapat diakses dan diawasi secara transparan. Selain itu, sistem ini meningkatkan akuntabilitas melalui jejak digital yang tercatat pada setiap langkah penyusunan anggaran (Haris, 2025). Di sisi lain, *e-procurement* mendukung transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang online yang mendorong persaingan yang sehat antarpenyedia secara adil. Mekanisme ini membantu mengurangi peluang adanya penyelengan, kolusi, dan praktik korupsi (Handoko, 2022). Efisiensi yang diperoleh tidak hanya berupa dari penghematan anggaran, tetapi juga peningkatan mutu layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Darmawan *et al.*, 2025).

E-Budgeting

E-budgeting adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi untuk menyusun anggaran yang membuat seluruh proses perencanaan dan pengesahan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Penerapan *e-budgeting* di berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah terbukti dapat mengurangi pengulangan anggaran dan meminimalkan potensi manipulasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja (Sulistyo Arini & Suci Nasehati, 2022).

Namun, keberhasilan *e-budgeting* tidak hanya bergantung kepada kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti kemampuan sumber daya manusia, integrasi sistem, dan efektivitas evaluasi internal (Bambang Subiyanto *et al.*, 2023). Aparat pemerintah sering kali menghadapi kendala teknis karena kurangnya pemahaman digital, sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang terus menerus (Prayitno, Henro, Anggita, 2025). Selain itu, adanya penolakan terhadap perubahan dan kekurangan infrastruktur di wilayah terpencil juga menghambat penggunaan sistem secara maksimal (Lesmana & Hendayana, 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *e-budgeting* sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan komitmen dari pemerintah daerah dalam melakukan perubahan digital (Sanjaya *et al.*, 2025).

H1: Implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

E-Procurement

Transformasi digital melalui *e-procurement* menjadi elemen krusial dalam perubahan birokrasi dan manajemen pemerintahan masa kini (Kalupe *et al.*, 2025). Sistem *e-procurement* tidak hanya menambah efisiensi dan transparansi, tetapi juga menguatkan kejujuran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Melalui sistem elektronik, informasi dapat diakses oleh publik, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shafa *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-procurement* dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya intervensi dalam proses pengadaan. Dalam kajian *Systematic Literature Review*, Marita *et al.*, (2021) menemukan bahwa implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia belum berjalan dengan maksimal terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sekain itu, terdapat juga kesenjangan dalam penelitian mengenai penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang berdampak pada lemahnya dukungan terhadap pengadaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan rencana yang lebih fokus untuk meningkatkan peran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) serta memastikan bahwa penerapan *e-procurement* berjalan dengan baik di setiap wilayah.

H2: Implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.

Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi belanja daerah merupakan topik penting dalam pengelolaan keuangan publik, terutama di era otonomi daerah yang memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Lathifah *et al.*, 2024). Melalui analisis Data Envelopment Analysis (DEA), tampak bahwa banyak provinsi di Indonesia masih belum mampu menggunakan anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rambe *et al.*, 2022). Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya pemborosan pada pengeluaran pegawai serta barang/jasa, tanpa adanya peningkatan yang signifikan dalam output layanan publik.

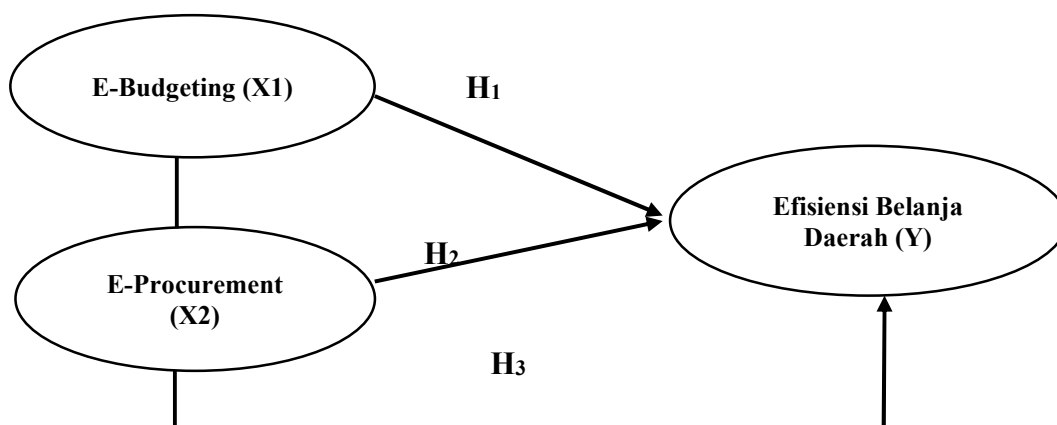
Simanjuntak *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program pemerintah hingga 25%, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, efisiensi belanja juga sangat tergantung pada kualitas perencanaan dan kemampuan lembaga (Putri, 2025). Borja-Vasquez *et al.*, (2024) menegaskan bahwa efisiensi abelanja sangat dipengaruhi oleh penerapan anggaran yang berbasis kinerja, sementara Ardihasna *et al.*, (2025) menekankan pentingnya evaluasi proyek publik sebagai indikator keberhasilan dan pencegah pemborosan.

Secara umum, efisiensi belanja tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas dari kebijakan yang ada, integritas dalam pengelolaan, dan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas (Fitranata, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *e-budgeting* dan *e-procurement* terhadap efisiensi belanja daerah menjadi sangat penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah (A. S. Apriliani *et al.*, 2022).

H3: Implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* secara simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.

1 Untuk lebih jelasnya rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



1 Sampel penelitian ini dengan jumlah variabel laten (konstruk) sebanyak 3 buah, skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini skala likert 5. Skala likert untuk penelitian ini memungkinkan untuk pengurutan data dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih untuk menilai dampak dari dua variabel independen, yaitu implementasi *e-budgeting* (X_1) dan *e-procurement* (X_2), pada variabel dependen, yaitu efisiensi belanja daerah (Y). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi yang terstruktur tentang hubungan antar variabel serta untuk menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kota Palopo yang telah mengimplementasikan sistem *e-budgeting* dan *e-procurement*. Populasi yang diteliti mencakup semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kewenangan Pemerintah Kota Palopo. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan antara lain:

1. OPD yang telah menerapkan *e-budgeting* dan *e-procurement* minimal selama dua tahun;
2. OPD yang terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa; dan
3. OPD yang bersedia menjadi responden penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 30 OPD yang memenuhi syarat dan dijadikan sebagai sampel penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada petugas atau staf di bagian keuangan, perencanaan, serta pengadaan barang dan jasa di setiap OPD yang diambil sebagai sampel. Instrumen kuesioner dirancang dengan menggunakan skala likert untuk menilai pandangan responden mengenai implementasi sistem digital dan tingkat efisiensi belanja daerah. Berikut ini adalah variabel-variabel serta indikator yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Indikator	Sumber
X1	<i>E-budgeting</i> , merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk merancang anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem ini dapat mempercepat waktu yang	1. Transparansi proses perencanaan anggaran.	(Soleh & Nurcahyanto, 2019)
		2. Keakuratan data dan informasi keuangan, serta	
		3. Efisiensi waktu dalam penyusunan anggaran	

2

dibutuhkan untuk menyusun anggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses dimana saja. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran.

X2	E-procurement , merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengatur informasi tentang pengadaan barang/jasa. Aplikasi ini berbasis internet yang dirancang agar proses pengadaan berlangsung secara efektif, efisien dan terintegritas.	1. Efisiensi proses pengadaan 2. Integrasi sistem antar unit 3. Pengurangan potensi penyimpangan atau praktik <i>fraud</i>.	(Sholeh <i>et al.</i> , 2024)
Y	Efisiensi belanja daerah , adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran dan sumber daya keuangan secara efektif dan berhemat. Ini berarti dapat menciptakan hasil atau layanan publik yang optimal dengan biaya atau pengeluaran yang seminimal mungkin, serta dengan pembagian yang sesuai dari segi jenis maupun proporsinya.	1. Tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi belanja, 2. Kecepatan pelaksanaan program, dan 3. Efektivitas pencapaian output kegiatan Pembangunan.	(Rahman, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh memiliki beberapa karakteristik berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, dan jabatan sebagaimana disajikan pada:

Table 2. Karakteristik Responden

Item Demografi	Frekuensi	Persentil(%)
Jenis Kelamin		
Wanita	36	60.00
Pria	24	40.00
Rentang Usia		
<25	4	6.67
26-35	15	25.00
36-45	34	56.67
>45	7	11.67
Jabatan		
Perencanaan	17	28.33

12

Karakteristik responden ini menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan aparatur pemerintah daerah yang relevan dan memiliki peran penting dalam penerapan sistem *e-budgeting* dan *e-procurement*, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual implementasi sistem tersebut di lingkungan instansi pemerintah.

Uji Validitas

Uji validitas adalah metode untuk menilai ketetapan setiap pertanyaan dalam kuesioner agar benar-benar mencerminkan aspek atau variabel yang diteliti. Instrumen yang memiliki validitas akan menghasilkan informasi yang tepat, stabil, dan dapat dipercaya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi item-total (*Pearson Product Moment*) melalui program SPSS. Sebuah item dianggap valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel berdasarkan nilai $\text{Sig.} < 0.05$, yang menunjukkan adanya hubungan kuat dan signifikan antara butir pernyataan dengan skor total variabel. Kemudian variabel dianggap reliabel apabila nilai cronbach's alphanya $\geq 0,70$. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>E-budgeting</i> (X_1)	EB1	0.825	0.254	Valid
	EB2	0.810	0.254	Valid
	EB3	0.769	0.254	Valid
	EB4	0.806	0.254	Valid
	EB5	0.739	0.254	Valid
	EB6	0.778	0.254	Valid
	EB7	0.725	0.254	Valid
<i>E-procurement</i> (X_2)	EP1	0.761	0.254	Valid
	EP2	0.870	0.254	Valid
	EP3	0.842	0.254	Valid
	EP4	0.910	0.254	Valid
	EP5	0.871	0.254	Valid
	EP6	0.840	0.254	Valid
	EP7	0.860	0.254	Valid
	EBD1	0.796	0.254	Valid

4

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Efisiensi Belanja Daerah (Y)	EBD2	0.799	0.254	Valid
	EBD3	0.868	0.254	Valid
	EBD4	0.822	0.254	Valid
	EBD5	0.868	0.254	Valid

Sumber: *output SPSS, 2025*

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel *E-budgeting*, *E-procurement*, dan Efisiensi Belanja Daerah memiliki r hitung $> r$ tabel (0,254) dan $\text{Sig.} < 0,05$, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
<i>E-budgeting</i>	7	0.928	$\geq 0,70$	Reliabel
<i>E-procurement</i>	7	0.957	$\geq 0,70$	Reliabel
Efisiensi Belanja Daerah	5	0.936	$\geq 0,70$	Reliabel

Sumber: *Output SPSS, 2025*

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$, yang berarti semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang tinggi dan mampu mengukur konstruk variabelnya secara stabil dan dapat dipercaya.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig.
	B	Std.Error	(Beta)			
(Constant)	-0.154	0.414		-0.372	2.000	0.711
<i>E-budgeting</i> (X_1)	0.854	0.087	0.748	9.843	2.000	0.000
<i>E-procurement</i> (X_2)	0.180	0.057	0.239	3.154	2.000	0.003
Adjusted R ²	0.688					
Sig. F	0.000					

Sumber: *Output SPSS, 2025*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan SPSS, diperoleh informasi mengenai pengaruh *E-budgeting* (X_1) dan *E-procurement* (X_2) terhadap

Efisiensi Belanja Daerah (Y). Model regresi menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.688, yang berarti bahwa sebesar 68,8% variasi perubahan Efisiensi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel *E-budgeting* dan *E-procurement*. Sisanya 31,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *E-budgeting* terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *E-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efisiensi Belanja Daerah, dengan nilai koefisien jalur mencapai 0.854 dan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$. Nilai koefisien yang signifikan ini menunjukkan bahwa *e-budgeting* merupakan elemen penting yang membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan kata lain, semakin optimal penerapan *e-budgeting*, maka semakin efektif pula proses perencanaan, pengalokasian, hingga pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan *e-budgeting* dalam digitalisasi anggaran dapat mengurangi kesalahan dalam penginputan data, mempercepat proses penyusunan anggaran, dan meningkatkan integrasi antara perencasnaan dan pelaksanaan program di tingkat pemerintahan daerah.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori akuntabilitas publik, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Melalui penerapan *e-budgeting*, setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat ditelusuri secara digital (*audit trail*), sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi atau penyimpangan anggaran. Sistem ini memungkinkan pihak legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memantau proses anggaran secara transparan, sejalan dengan prinsip *good governace* yang menuntut efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, seperti A'yun & Hartaman, (2021) yang menyebutkan bahwa *E-Budgeting* menjadi instrumen strategis dalam reformasi birokrasi keuangan publik, karena memperkuat integritas dan transparansi pengelolaan anggaran. Penelitian Sulistyio Arini & Suci Nasehati, (2022) dan Prayitno, Henro, Anggita, (2025) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa penerapan *E-Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, serta menekan terjadinya duplikasi dan pemborosan belanja daerah. Selain itu, A. S. Apriliani *et al.*, ((2022) mengungkapkan bahwa sistem *E-Budgeting* memberikan dampak positif

terhadap efisiensi belanja daerah melalui peningkatan keakuratan data dan percepatan proses birokrasi. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *E-Budgeting* tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada komitmen aparatur dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran.

Pengaruh *E-Procurement* terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik

19 Berdasarkan hasil penelitian ini *e-procurement* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah, dengan nilai koefisien sebesar 0.180 dan tingkat signifikan $p = 0.003$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, semakin efisien pula penggunaan anggaran daerah. *E-procurement* memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara daring dengan prinsip keterbukaan dan persaingan sehat, sehingga mampu menekan potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem ini, setiap proses lelang, mulai dari pengumuman, penawaran, hingga penetapan pemenang, dan terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh publik.

Hasil ini selaras dengan teori *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya sistem *E-procurement*, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara efektif, cepat, dan hemat biaya administrasi. Hasil penelitian ini mendukung temuan Handoko, (2022) yang menyatakan bahwa *E-procurement* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas serapan anggaran daerah dan berperan penting dalam memperkuat integritas keuangan publik. Selain itu, penelitian Ariadi *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* terbukti menekan praktik fraud dalam pengadaan barang dan jasa melalui transparansi informasi lelang dan pengawasan publik. Sejalan dengan itu, Shafa *et al.*, (2021) menegaskan bahwa penerapan sistem LPSE (Layana Pengadaan Secara Elektronik) memperluas akses informasi pengadaan serta meningkatkan persaingan sehat antar penyedia barang dan jasa. Penelitian Marita *et al.*, (2021) juga mengungkapkan bahwa meskipun penerapan *E-procurement* di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi dan sumber daya manusia, sistem ini tetap berkontribusi positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengaruh *E-budgeting* dan *E-procurement* secara simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah

15 Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, *E-budgeting* dan *E-procurement* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Efisiensi Belanja Daerah, yang ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0.688. Artinya, 68,8% variasi efisiensi belanja daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara 31,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model, seperti kapasitas aparatur, integrasi sistem informasi, dan kebijakan kelembagaan. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi penerapan *E-budgeting* dan *E-procurement* merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Darmawan *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi keuangan publik melalui integrasi sistem penganggaran dan pengadaan mempercepat pencapaian efisiensi serta meningkatkan transparansi anggaran. Mubaraq *et al.*, (2025) juga menguatkan temuan ini dengan menyebutkan bahwa sinergi antar *E-budgeting* dan *E-procurement* berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan efektivitas implementasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital dalam keuangan publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah daerah. Penelitian Fikriyah & Trisnaningsih, (2022) menegaskan bahwa masih ada daerah yang menghadapi hambatan dalam optimalisasi *E-budgeting* dan *E-procurement* akibat keterbatasan teknis dan pemahaman aparatur. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem integrasi antar-aplikasi keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, Narimawati *et al.*, (2024) menyoroti perlunya standarisasi sistem digital keuangan daerah agar seluruh proses penganggaran, pengadaan, dan pelaporan dapat berjalan selaras dan transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik dengan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan melalui *E-budgeting* dan *E-procurement* mampu meningkatkan efisiensi belanja daerah, memperkuat prinsi *good governance*, dan mendukung tujuan reformasi birokrasi keuangan publik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memperluas penerapan sistem keuangan digital yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), serta memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implemetasi *e-budgeting* dan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

efisiensi belanja daerah dalam akuntansi keuangan sektor publik. Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik dan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penerapan *e-budgeting* memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara sistematis dan terintegrasi secara digital, sedangkan *e-procurement* mendorong efisiensi pengadaan melalui keterbukaan informasi dan persaingan yang sehat. Secara simultan, kedua sistem tersebut memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi *e-budgeting* dan *e-procurement* sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik. Bagi masyarakat, efisiensi belanja daerah berdampak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, bagi perusahaan atau penyedia barang dan jasa, penerapan sistem digital menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, adil, dan kompetitif, sehingga mendukung iklim usaha yang profesional dan berkelanjutan.